

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Adanya akuntabilitas merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah. Tidak dipenuhinya pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung diperoleh dari pendayagunaan potensi keuangan daerah sendiri, maupun tidak langsung dengan melalui mekanisme perimbangan keuangan. Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah seharusnya bersifat vertikal, bertanggungjawab pada DPRD dan horizontal, pada masyarakat luas. Namun

demikian, pada kenyataannya saat ini sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat luas.

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Untuk memberikan penilaian perlu dilakukannya audit kinerja yang memadai pada entitas pemerintah. Hasil laporan audit harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja aktual dengan yang telah dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan, dimana pada audit keuangan lebih berfokus pada penilaian laporan keuangan apakah telah mencapai tujuan organisasi atau tidak. Pada audit keuangan melakukan perbandingan antara realisasi dan anggaran untuk menetapkan baik buruknya kinerja organisasi. Namun pada audit kinerja terdapat lingkup yang lebih luas lagi, selain dari tercapai tidaknya sasaran juga apakah kinerja organisasi telah terlaksana dengan ekonomis, efektif dan efisien.

Akuntabilitas kinerja pemerintah memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Dengan adanya audit kinerja diharapkan dapat tercapai akuntabilitas publik yang diharapkan. Contoh pada kasus Pemerintah Kota Bekasi pada Harian Radar Bekasi 15 Maret

2012 diberitakan pemeriksaan BPK atas kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang buruk, pembangunan daerah yang harus dilakukan tidak tentu arahnya. APBD sudah disusun dan disetujui tapi pembangunan berjalan lamban, banyak pembangunan yang belum diselesaikan tepat waktu dan tidak sesuai anggaran. Hal ini memicu kecurigaan dari elemen masyarakat dan kemudian menuntut akuntabilitas publik. Padahal sebagai Pemerintah Wilayah Kota, pasti Pemerintah Kota Bekasi memiliki audit kinerja yang memadai. Seharusnya aparat pemeriksa intern pemerintah dan menemukan masalah ini sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh BPK sehingga masalah seperti ini tidak terjadi. Bekasi sebagai wilayah kota yang terhitung mapan dan aksesibilitas informasi kepada Pemerintah Pusat yang mudah dilakukan. Namun akuntabilitas kinerja masih belum dapat dicapai Pemerintah Kota Bekasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang penerapan audit kinerja yang ada di Kabupaten Bandung dan bermaksud untuk mengkaji ke dalam skripsi yang berjudul **"PENGARUH PENERAPAN AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menentukan fokus permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah audit kinerja telah diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung secara memadai?
2. Apakah penerapan audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung secara signifikan?

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai pengaruh penerapan audit kinerja di Inspektorat Kabupaten Bandung pada akuntabilitas publik, dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui apakah audit kinerja telah diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung secara memadai.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara signifikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan berpikir bagi penulis mengenai pengaruh penerapan audit kinerja di Inspektorat Kabupaten Bandung pada akuntabilitas kinerja.

2. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, terutama bagi pihak-pihak yang terkait langsung pada audit kinerja.

3. Bagi Pihak Lain

Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang sedang menghadapi masalah dalam pengambilan keputusan dan berminat mengadakan penelitian sejenis maupun lebih lanjut mengenai masalah ini.